

# **Dinamika Politik Agus Arifin Nu'mang Dalam Menentukan Pasangan Pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Sulawesi Selatan Tahun 2018**

## **Agus Arifin Nu'mang Political Dynamics in Determining a Partner in Regional Head Election (PILKADA) OF South Sulawesi Year 2018**

### **TESIS**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister



Disusun oleh:  
**MUHAMMAD KAFRAWY**  
P 4300 216 001

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2020**



TESIS

DINAMIKA POLITIK PENCALONAN AGUS ARIFIN NU'MANG  
DALAM MENENTUKAN PASANGAN PADA PEMILIHAN KEPALA  
DAERAH (PILKADA) SULAWESI SELATAN 2018

Disusun dan diajukan oleh

**MUHAMMAD KAFRAWY**

Nomor Pokok P4300216001

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis  
pada tanggal **13 Agustus 2020**  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui  
Komisi Penasihat



Prof. Dr. H. Armin, M.Si.

Ketua

Ketua Program Studi  
Ilmu Politik,



Dr. Ariana, S.IP., M.Si.



Dr. Adi Suryadi B., M.Si.

Anggota

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. H. Armin, M.Si.



## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan ini saya, Muhammad Kafrawy menyatakan bahwa tesis yang berjudul Dinamika Politik Agus Arifin Nu'mang Dalam Menentukan Pasangan Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sulawesi Selatan Tahun 2018 ini adalah benar karya saya. Apabila terbukti tesis ini merupakan karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Makassar, 29 Juli 2020



Muhammad Kafrawy



## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat untuk Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabatnya.

Penulis menyadari kelemahan serta keterbatasan yang ada sehingga dalam menyelesaikan tesis ini memperoleh bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu baik dalam proses penelitian maupun selama penulisan. Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A, selaku Rektor Universitas Hasanuddin
2. Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik sekaligus selaku dosen pembimbing 1 yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan tesis ini serta atas ilmu yang diberikan selama masa studi pada jurusan ilmu politik Program Magister Pascasarjana Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Hasanuddin.



3. Bapak Dr. Adi Suryadi Culla, selaku dosen pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan semangat serta motivasi selama penyusunan tesis, begitupun dengan ilmu yang diberikan selama masa studi pada pada jurusan ilmu politik Program Magister Pascasarjana Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Prof. Muhammad, M.Si, Selaku Ketua Program studi ilmu politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNHAS sebelumnya.
5. Bapak Dr. Phil. Sukri, S.IP, M.Si, selaku Wakil Dekan FISIP UNHAS dan dosen penguji yang telah meluangkan waktu untuk menguji tesis ini.
6. Ibu Dr. Ariana, S.IP, M.Si, selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktu untuk menguji tesis ini dan sekaligus Ketua Program Studi Ilmu Politik Fisip UNHAS yang baru.
7. Dr. Suhardiman, S. Sos, M.Si, dosen penguji yang telah meluangkan waktu untuk menguji tesis ini.
8. Kanda Andi Ahmad Yani, Ph.D (Candidate) yang memotivasi penulis agar segera lulus dan Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP).
9. Ibu dan Bapak dosen yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas ilmu yang telah diberikan selama masa studi yang masih ada dan sudah tiada, surah al-fatihah selalu kupersembahkan. Aamiin.



ua orang tuaku (Drs. KH. Saenong Ibrahim, M.Ag dan Hj. iah Saleh), saudara-saudaraku (K'Farid, K'Salihin, K'Ummi, ha, K'Nisa, K'lja) atas doa dan semangat yang tak pernah

berhenti sehingga menjadi kekuatanku selama menyelesaikan tesis ini.

11. Istriku (irma) tercinta serta anakku (kefee) tersayang, kalianlah yang menjadi semangat.
12. Teman-teman seperjuangan angkatan 2016 : ica, Fate, ummi, wulan, nisa, wahyu, ricardo, rival, fikar, franz, james, paul, Asfira, Awi, Arie, Aji Nisa, Mega Yabes, Erna, Andriani, Wijaya, Iccank, Irwan, Arta, Jaya, Mahbub dan ovel untuk keceriaan dan kenangan serta telah menjadi bagian dalam perjalanan studiku.
13. Staf FISIP dan Staf akademik Program Magister, Pascasarjana Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik atas bantuannya dalam mengurus keperluan akademik dan administrasi selama penulis melaksanakan studi.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu lbarat tiada gading yang tak retak, penulis menyadari bahwa dalam tesis ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu masukan berupa kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak.

Makassar, Juli 2020

Penulis



## ABSTRAK

**MUHAMMAD KAFRAWY.** *Dinamika Politik Pencalonan Agus Arifin Nu'mang Dalam Menentukan Pasangan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Sulawesi Selatan Tahun 2018* (dibimbing oleh Armin dan Adi Suryadi B).

Penelitian ini bertujuan mengetahui dinamika Agus Arifin Nu'mang dalam menentukan pasangan dan faktor-faktor modal yang menyebabkan Agus Arifin Nu'mang berpasangan dengan Tanribali Lamo.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara, kajian pustaka dan kajian dokumen. Teori yang digunakan adalah teori modal, konsep aktor dan macam-macam kekuatan Politik. Landasan analisisnya menggunakan teori modal Pierre Bourdieu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Agus Arifin Nu'mang sebagai calon gubernur mengalami banyak dinamika politik dalam proses pencalonannya untuk menentukan pasangan. Ini disebabkan banyaknya modal yang mesti terpenuhi, tekanan aktor-aktor dan kekuatan politik yang ada. Pilkada di Sulawesi Selatan bukan hanya mendatangkan modal dukungan dari partai politik, melainkan ada aktor-aktor politik yang harus terlibat di dalamnya. Dinamika bergantinya pasangan Agus Arifin Nu'mang dalam pencalonan gubernur, mulai dari Aliyah Mustika, Andi Nurpati dan akhirnya berpasangan dengan Tanribali Lamo sudah tentu ada dukungan modal untuk memajukan Agus Arifin Nu'mang-Tanribali Lamo sebagai calon kepala daerah di Sulawesi Selatan.

Kata Kunci: Dinamika, Modal, dan Aktor.



## ABSTRACT

**MUHAMMAD KAFRAWY.** *Agus Arifin Nu'mang's Political Dynamics in Determining a Partner in Regional Head Election (PILKADA) OF South Sulawesi Year 2018* (supervised by Armin and Adi Suryadi B.).

The research had two objectives, first, Agus Arifin Nu'mang's dynamics in determining the partner, second, the capital factors causing Agus Arifin Nu'mang to have Tanribali Lamo as the partner.

This was the qualitative research using the descriptive analysis. The research data were the primary and secondary data which were obtained through the interview, library and documentary studies. The research used capital theory, actor concept, kinds of political powers. The analysis foundation used Pierre Bourdieu's capital theory.

The research result indicates that the candidate determination by Agus Arifin Nu'mang has the impact on his candidacy process as the governor and undergoes many political dynamics. This is caused by many capitals which must be fulfilled, pressures from existing actors and political powers. The regional head election (PILKADA) in South Sulawesi not only brings in the capital support from the political parties, but there are also the political actors who have to be involved in it. The dynamics of the changes of Agus Arifin Nu'mang's partners in the governor candidacy, starting from Aliyah Mustika, Andi Nurpati, and finally Tanribali Lamo has certainly obtained the capital support to promote Agus Arifin Nu'mang – Tanribali Lamo as the regional head candidates in South Sulawesi.

Key words: Dynamics, capital, actor.



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TESIS</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>ABSTRACT</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	x
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.5 Batasan Istilah dan Defenisi Operasional.....	13
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Teori Modal.....	15
2.2. Konsep Aktor.....	21
2.3 Macam-Macam Kekuatan Politik .....	24



2.4 Penelitian Terdahulu.....	31
2.5 Kerangka Pikir.....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Lokasi Penelitian.....	40
3.2 Tipe dan Dasar Penelitian. . . . .	40
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	41
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.5 Teknik Analisis Data.....	44
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN OBYEK PENELITIAN</b>	
4.1 Gambaran Umum Wilayah Penelitian .....	47
4.1.1 Deskripsi Wilayah .....	46
4.1.2 Penduduk.....	49
4.1.3 Pemerintahan .....	49
4.2 Obyek Penelitian.....	62
4.2.1 Profil Agus Arifin Nu'mang, Aliyah, Andi Nurpati dan Tanribali.....	62
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
5.1 Dinamika Mencari Pasangan dan Dukungan Agus Arifin Nu'mang.....	71
5.1.1 Agus Berpasangan dengan Aliyah.....	81
5.1.2 Agus Berpasangan dengan Andi Nurpati.....	87



5.2	Faktor-faktor Penyebab Agus Akhirnya Berpasangan dengan Tanribali.....	90
5.2.1	Modal Ekonomi Agus-Tanribali.....	90
5.2.2	Modal Kultural Agus-Tanribali.....	95
5.2.3	Modal Sosial Agus – Tanribali.....	97
5.2.4	Modal Simbolik Agus-Tanribali.....	100
5.3	Implikasi Penelitian.....	104
<b>BAB</b>	<b>VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
6.1	Kesimpulan.....	107
6.2	Saran.....	108
6.3	Rekomendasi.....	109
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		<b>110</b>



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Daftar Kabupaten dan Kota di Sulsel	49
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk yang tersebar di Sulsel	52
Tabel 4.4 Nama, Dapil dan Partai Anggota DPRD Sulsel 2014-2019	57
Tabel 5.2 Kekayaan Agus – Tanribali dalam Pencalonan	94



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Penelitian	39
Gambar 4.3 Daerah Pemilihan Anggota DPRD Prop. Sulsel	54
Gambar 5.1. Modal Agus – Tanribali Dalam Pencalonan	91



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Agus Arifin Nu'mang berada dalam posisi dilema untuk menentukan calon pasangannya untuk maju dalam pemilihan kepala daerah di Sulawesi Selatan tahun 2018. Agus Arifin Nu'mang mempersiapkan dirinya untuk menjadi orang nomor satu di Propinsi Sulawesi Selatan. Agus sosok tangguh dalam politik, disebabkan karirnya dimulai dari jabatan politik paling bawah dan mampu naik menuju karir politik tertinggi.

Keikutsertaan Agus dalam jabatan politik di pemerintahan sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Sulawesi Selatan. Agus mewakili Partai Golkar dan memegang posisi penting di DPRD sebagai Ketua. Agus memainkan peran penting dalam struktur jabatan di DPRD. Selama menjabat DPRD, Agus mampu menjalankan komunikasi politik yang baik terhadap seluruh fraksi partai politik. Ini bagian dari kecerdasan Agus memimpin politik walau terbilang belum terlalu senior di Partai Golkar.



Partai Golkar sangat khas dengan nuansa senioritas. Agus hadir di berlambang Beringin ini menghilangkan suasana jabatan yang

tua yang menjabat. Agus menjabat Sekretaris Partai Golkar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sulawesi Selatan sejak 1998-2007. Menjadi petinggi di Partai Beringin adalah pencapaian Agus yang hebat dikarenakan karir politiknya dimulai dari partai ini. Sehingga di tahun 2008, Agus berpasangan dengan Syahrul Yasin Limpo untuk periode pertama menjadi Wakil Gubernur di Sulsel.

Pada Pemilihan Umum (Pemilu) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel tahun 2007, Agus dipinang Syahrul untuk menjadi pasangan calon. Syahrul keluar dari pasangan sebelumnya yaitu Amin Syam yang merupakan Gubernur Sulsel. Amin Syam berpasangan dengan Mansyur Ramli dengan dukungan dari Partai Golkar. Sedangkan pasangan Aziz Qahhar Mudzakkar berpasangan dengan Mubyl Handaling yang diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Syahrul dan Agus merupakan kader Partai Golkar. Namun, pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2007, mereka diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Akhirnya Syahrul dan Agus memenangi kontestasi tersebut melalui jalur terakhir yaitu Mahkamah Agung (MA).

Perjalanan Agus menjadi orang nomor 2 di Sulsel tidak mudah. Di periode keduanya berpasangan kembali dengan Syahrul diusung oleh Partai Golkar. Pilgub Sulsel tahun 2013 ini, berhasil mengumpulkan tiga pasangan selain Syahrul dan Agus. Pasangan lainnya yaitu Ilham Arifin berpasangan Aziz Qahhar Mudzakkar diusung Partai



Demokrat. Sedangkan pasangan terkahir, usungan Partai Gerindra yaitu Rudiyanto Asapa dan A. Nawir Pasinringi.

Proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan dinamika kepemimpinan di daerah. Pergantian pemimpin daerah setiap 5 tahunan merupakan pendewasaan politik di daerah. Mengapa perlu pergantian kepala daerah seperti Pemilihan Gubernur (Pilgub)? Hal ini dilakukan agar setiap orang memiliki kesempatan menjadi pemimpin politik di daerahnya tanpa terkecuali. Tidak ada aturan yang melarang setiap individu untuk ikut maju menjadi kepala daerah sesuai aturan yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang (UU).

Dalam hal ini, Agus Arifin Nu'mang yang telah memimpin Sulawesi Selatan selama dua periode bersama Gubernur Syahrul Yasin Limpo berkeinginan untuk menjadi kepala daerah. Agus bisa memilih figure siapa saja yang akan menjadi calon wakilnya sehingga dapat maju melalui dukungan partai politik ataupun independen.

Dalam Undang-Undang No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.1 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota. UU ini di antaranya mengatur tentang bolehnya kepala daerah maju secara independen dengan syarat tertentu.<sup>1</sup>

Kesempatan setiap individu dengan dasar UU di atas menjadi pemantik  
mua orang dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dapat



---

<sup>1</sup>10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

menjadi kepala daerah. Kepala daerah yang mewakili suara rakyat banyak tanpa melalui dukungan partai politik.

Kepala daerah juga dimanfaatkan melalui perwakilan partai politik. Tidak sedikit partai-partai kecil harus berkoalisi dengan partai yang memiliki keterwakilan besar untuk memajukan calon kepala daerahnya. Saat ini, di Sulawesi Selatan, syarat partai politik mengajukan calon kepala daerah untuk gubernur dan wakil gubernur harus memiliki 17 kursi keterwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi.

Pada mulanya, Agus akan berpasangan dengan Aliyah Mustika Ilham melalui Partai Demokrat. Agus yang merupakan kader Partai Gerindra berharap dukungan melalui dua partai ini akan mencukupi jika akan maju melalui jalur dukungan partai politik. Bahkan dalam internal tim Agus tanggal 27 November 2017 menyebutkan telah mengumpulkan 692.769 Kartu Tanda Penduduk (KTP) dukungan dari pendukungnya.<sup>2</sup>

Setelah batal berpasangan dengan Aliyah, Agus mengumumkan akan berpasangan dengan Andi Nurpati yang merupakan petinggi Partai Demokrat. Agus berharap melalui pasangannya ini, mendapat dukungan dari Gerindra, PKS dan tentu Partai Demokrat. Sehingga kabar untuk maju jalur perseorangan sedikit kurang meyakinkan. Agus – Nurpati



---

<sup>2</sup>ajar, *Manuver Agus Usik NA*, tanggal 27 November 2017. 600 ribu lebih KTP merupakan dukungan yang besar dari massa Agus. Syarat untuk maju melalui penden yaitu 480.124 KTP-el dukungan sesuai dengan aturan dari Komisi Umum (KPU) Sulawesi Selatan.

hingga akhir pendaftaran untuk maju di jalur perseorangan tidak dilakukan. Sehingga, harapan terakhirnya adalah mendaftar melalui jalur partai politik.

11 Januari 2018 merupakan akhir pendaftaran calon pasangan gubernur dan wakil gubernur melalui jalur partai politik. Agus akhirnya berpasangan dengan Tanribali Lamo dengan dukungan parpol dari Gerindra, Partai Bulan Bintang dan terakhir Partai Persatuan Pembangunan. Tentu batalnya berpasangan dengan Nurpati karena Agus mendaftar di detik akhir penutupan berpasangan dengan Tanri. Pasangan Agus – Tanribali yang didukung oleh tiga partai tentunya mendapat perhatian rakyat karena dianggap pasangan yang tepat untuk memimpin Sulsel. Harapannya tentu kemenangan saat pemilihan gubernur nanti.

Sebelumnya, Tanribali merupakan kandidat yang akan berpasangan dengan Nurdin Abdullah. Namun, kenyataannya Nurdin mendaftar di KPU berpasangan dengan Andi Sudirman Sulaiman. Jusuf Kalla yang diketahui memaketkan Nurdin-Tanribali merasa kecewa dan akhirnya memaketkan pasangan Tanribali sebagai wakil bersama Agus Arifin Nu'mang yang mendaftar di akhir masa pendaftaran di KPU. JK tentu berharap, dengan bergabungnya Agus-Tanribali mampu memenangi Pilkada Gubernur Sulsel 2018.



Kemenangan kepala daerah di Provinsi adalah kemenangan kekuatan rakyat untuk memenangkan calonnya dibuktikan melalui

hasil pemilihan. Bagi calon kepala daerah yang memiliki banyak suara, secara otomatis akan memenangi pertarungan pilkada provinsi. Bagi yang kalah, harus segera kembali bersatu agar dapat mendukung kemajuan daerah bagi kepala daerah yang baru terpilih.

Pemimpin daerah merupakan gerbong untuk kemajuan wilayah setempat. Kepala daerah mesti secara benar dipilih, agar arah wilayah dapat diakomodasi secara teratur dan terencana baik. Kepala daerah bukan ibarat memilih kucing dalam karung, namun masyarakat harus kenal siapa yang akan memimpinnya, apa programnya dan apa saja upaya-upaya calon untuk memajukan daerah ke arah yang lebih baik.

Penelitian ini memiliki dua misi utama, yaitu melihat kesempatan petahana (incumbent) untuk mendapat dukungan partai politik (parpol). Kedua, memahami bagaimana modalitas untuk menaikkan kepercayaan masyarakat kepada Agus Arifin Nu'mang berpasangan Aliyah Mustika Ilham, Agus – Andi Nurpati atau Agus Tanribali Lamo dalam pencalonan pasangan Gubernur pada Pilkada Sulsel tahun 2018. Penelitian ini dilaksanakan di Sulawesi Selatan (Sul-Sel) selama proses pencalonan Agus Arifin Nu'mang untuk mencari pasangan di segala kehidupan politik.

Posisi petahana selalu memiliki keuntungan. Keuntungan pertama, karena petahana memiliki kemasyhuran yang lebih tinggi gkan calon-calon baru. Kedua, petahana mempunyai anggaran untuk mensosialisasikan program pemerintah bersamaan mencari



simpati kepada konstituen. Ketiga, petahana memiliki pengalaman untuk mengelolah daerah. Sehingga, para calon kandidat yang berkeinginan maju, maka harus bergerak lebih banyak dibanding kekuatan petahana.

Tren petahana kalah membuat dilema bagi calon petahana yang hendak maju kembali. Kita dapat lihat kasus pemilihan Gubernur di Jakarta. Basuki Tjahaja Purnama - Djarot Saiful Hidayat harus menerima kekalahan dari pasangan Anies-Sandi. Tidak ada jaminan seorang petahana mendapat kesempatan yang besar. Kompetisi Pilkada sejatinya mengambil hati rakyat.

Potensi pembangunan selama kepemimpinan petahana dapat menjadi alat kampanye. Pembangunan manusia dan pembangunan fisik memberi bukti setiap petahana untuk menunjukkan kualitas kerja selama kepemimpinan. Pembangunan fisik dan non-fisik di daerah menjadi alat petahana untuk mempromosikan kemampuan kinerjanya kepada masyarakat.

Kemampuan membaca dan memanfaatkan peluang untuk petahana perlu selalu diukur. Agus Arifin Nu'mang selama dua kali pemilihan bergabung kepada Syahrul Yasin Limpo memiliki rangking yang tinggi. Semuanya dilihat melalui hasil survei oleh lembaga survei politik yang ada di Indonesia. Periode ketiga merupakan kesempatan bagi Agus



maju melanjutkan masa pemerintahannya untuk menjadi orang (satu) di Sul-Sel.

Menurut Adi Suryadi Culla, pengamat politik Unhas, bahwa Agus memiliki pengaruh yang begitu besar, berdampak jika mendapat dukungan salah satu calon. Agus merupakan *The Real Politics* meminjam istilah Culla.<sup>3</sup> Kekuatan Agus melalui jaringannya mampu menggerakkan parpol untuk berpindah untuk mendukungnya berpasangan dengan Tanribali Lamo.

Pembangunan manusia selama periode kepemimpinan Agus begitu meningkat. Pendidikan gratis digalakkan. Pendidikan merupakan indikator utama dalam melihat kualitas pembangunan manusia di daerah. Tidak ada bagi pemimpin daerah untuk memajukan sumber daya manusia melainkan melalui jalan pendidikan. Anggaran yang terbatas dan budaya masyarakat yang cenderung sederhana menjadi hambatan untuk memajukan pendidikan. Namun, Agus mencoba dan membuktikan bahwa pendidikan dapat dimajukan asal ada kemauan dari pemerintah dan masyarakat.

Pembangunan infrastruktur di masyarakat begitu pesat. Pembangunan jalan raya di seluruh pelosok. Pembukaan jalan baru merupakan untuk memulai pembangunan ke daerah-daerah. Pembangunan yang telah dan akan dilakukan Agus adalah pembangunan yang merata di semua daerah. Pembangunan daerah Enrekang dan

misalnya harus juga dikembangkan seperti di daerah yang



---

ajar, *Manuver Agus Usik NA*, tanggal 27 November 2017

berdekatan dengan Makassar seperti Gowa dan Maros. Pembangunan yang telah dan hendak dilakukan Agus selalu dimulai dengan melihat prioritas daerah yang perlu dikembangkan tanpa mengabaikan daerah lainnya.

Prestasi laporan keuangan yang berhasil dicapai Sul-Sel adalah laporan keuangan daerah yang transparan. Penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia secara berturut-turut 7 kali. Ini tidak mudah bagi pemerintah daerah seperti Sulawesi Selatan yang sukses dalam mengelolah dan melaporkan keuangan daerahnya. Tidak semua daerah dapat melakukan seperti yang dilakukan Sulawesi Selatan. Komitmen Agus dalam pertanggungjawaban keuangan nampak pada kepemimpinannya. Ini terbukti dan dapat dijadikan acuan untuk memilih pemimpin seperti Agus.

Peningkatan layanan kepada masyarakat juga begitu sinergi dengan program-program kesehatan gratis bagi masyarakat. Sul-Sel merupakan satu-satunya daerah yang memiliki Jaminan Kesehatan Daerah. Pemerintah begitu perhatian untuk melayani masyarakat dalam bidang kesehatan. Pelayanan kesehatan di tingkat Kecamatan, Daerah dan Propinsi. Pelayanan-pelayanan ini diambil dari dana daerah. Pengelolaan yang baik dan cangguh sehingga pelayanan kesehatan dapat



tan. Agus memiliki peran penting untuk menyukseskan pelayanan an gratis. Pembangunan rumah sakit dan perbaikan sarana terus

dilakukan selama periode kepemimpinan saat menjadi pemimpin di Sul-Sel.

Oleh karena itu, penelitian mengenai dinamika politik Agus Arifin Nu'mang dalam menentukan pasangan dalam pilkada. Agus Arifin Nu'mang-Tanribali Lamo menjadi pasangan yang terakhir mendaftar dalam bursa calon gubernur di Sulawesi Selatan. Hal ini penting dilakukan karena penelitian ini akan menyajikan dinamika dukungan pasangan Agus untuk menjadi pasangan gubernur pada pilkada di Sulawesi Selatan tahun 2018.

## 1.2. Rumusan Masalah

Fokus penelitian ini akan menganalisis dinamika pencalonan Agus Arifin Nu'mang menentukan pasangan dengan Aliyah, Andi Nurpati dan Tanribali. Kemudian akan menjelaskan beberapa aspek modalitas yang dimiliki Agus Arifin Nu'mang dalam pencalonan Gubernur tahun 2018. Untuk kepentingan analisis, maka penelitian ini akan mengidentifikasi kekuatan-kekuatan apa saja, mulai dari tahap; (a) Mendapat pasangan dan dukungan parpol; (b) Modalitas untuk menaikkan kepercayaan sehingga berpasangan dengan Tanribali. Berdasarkan uraian fokus

tersebut, maka masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah berikut:



1. Bagaimana Dinamika Politik Agus Arifin Nu'mang dalam mencari pasangan calon wakil gubernur?
2. Mengapa pada akhirnya Agus Arifin Nu'mang memilih Tanribali Lamo sebagai pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2018?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah sebagaimana ditetapkan di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis dinamika Agus Arifin Nu'mang dalam mencari pasangan calon wakil gubernur.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis alasan Agus Arifin Nu'mang memilih Tanribali Lamo sebagai calon wakil gubernur dalam pilkada Sulsel Tahun 2018.



#### 1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademik maupun empiris, yaitu:

##### 1. Manfaat Akademik

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan secara ilmiah proses dinamika menentukan dukungan partai politik kepada aktor politik Agus Arifin Nu'mang – Aliyah Mustika, Agus AN – Andi Nurpati dan Agus AN – Tanribali dalam pencalonan pasangan gubernur Sulawesi Selatan tahun 2018.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan modalitas yang dimiliki Agus Arifin Nu'mang-Tanribali Lamo dalam pencalonan pasangan gubernur Sulawesi Selatan tahun 2018.

##### 2. Manfaat Empiris

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan calon kepala daerah untuk dapat melanggengkan kekuasaannya melalui pemilihan pasangan dan kepemilikan modal.
- b. Memberikan bahan masukan mengenai hambatan yang akan dialami petahana jika akan maju kembali dalam pemilihan kepala daerah.



## 1.5. Batasan Istilah Dan Definisi Konseptual

Batasan masalah dibuat untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul, maka peneliti akan menjelaskan terlebih dahulu yang dimaksud dengan judul penelitian “Dinamika Politik Pencalonan Agus Arifin Nu’mang dalam Menentukan Pasangan pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Sulawesi Selatan 2018”. Adapun penjelasan sekaligus pembatasan istilah untuk masing-masing variabel tersebut adalah:

### 1. Teori Modal

Bouerdieu berpendapat bahwa dalam suasana kompetitif ada berbagai macam jenis modal yang diuntungkan saat dimiliki oleh orang-orang tertentu. Yaitu modal ekonomi, kultural, sosial, dan simbolis.<sup>4</sup> Modal ini yang harus dimiliki para kandidat yang akan meraih simpati rakyat pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Sulawesi Selatan tahun 2018. Pada penelitian ini, segala bentuk modal para kandidat untuk memenangi pilkada.



---

Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Dari Teori Sosiologi Klasik erkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 583

## 2. Teori Aktor

Aktor merupakan individu yang menjalankan sebuah pekerjaan. Jika pekerjaannya adalah politik, maka disebut aktor politik. Aktor politik menurut McNair, yaitu individu yang menginginkan melalui organisasi atau institusi memengaruhi segala proses pembuatan keputusan.<sup>5</sup> Aktor politik dimisalkan seorang Gubernur atau Wakil Gubernur yang mampu memengaruhi proses pembuatan kebijakan. Pada penelitian ini aktor politik yang dimaksud adalah wakil gubernur dan kandidat lain yang akan menjadi gubernur dan wakil gubernur di pilkada tahun 2018.

## 3. Macam-macam Kekuatan Politik

Menurut Almond, ada bentuk atau macam-macam kekuatan yang digunakan untuk meraih kepentingan dalam meraih tempat dalam lingkungan politik.<sup>6</sup> Yaitu kelompok kepentingan dan partai politik. Kekuatan-kekuatan inilah yang menjadi senjata para kandidat untuk menaikkan atau bahkan menurunkan dinamika dukungan untuknya. Pada penelitian ini, segala bentuk kekuatan politik kandidat akan dielaborasi.

---

<sup>5</sup> Ardhita Yuliana Nugraheni, *Pengaruh Pengetahuan Politik dan Aktor Politik Terhadap i Politik Masyarakat Desa Trimurti, Srandakan, Bantul Pada Pilkada 2015*, 51

A. Almond, *Kelompok Kepentingan dan Partai Politik*, dalam *Perbandingan Politik*, Mochtar Mas'oeed dan Colin MacAndrews (eds), 2013, h. 64



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan landasan teoritis yang relevan yang digunakan untuk memahami konsep-konsep penting terkait dinamika politik pencalonan Agus Arifin Nu'mang dan Tanribali Lamo dalam pilkada Sulawesi Selatan tahun 2018, di antaranya; teori modal, konsep aktor dan macam-macam kekuatan politik.

Teori tersebut diharapkan mampu menjadi dasar dalam menganalisa dan mengembangkan temuan-temuan di lapangan.

#### 2.1. Teori Modal

Pierre Bouerdieu berpendapat bahwa dalam suasana kompetitif ada berbagai macam jenis modal yang diuntungkan saat dimiliki oleh orang-orang tertentu. Yaitu modal ekonomi, kultural, sosial, dan simbolis.<sup>1</sup> Kekuatan modal ini sangat diperlukan terutama saat seorang kandidat akan merebut kekuasaan di masyarakat.



---

Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Dari Teori Sosiologi Klasik erkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 583

Modal menurut Bourdieu dalam bukunya *The Form of Capital*, terbagi dalam tiga modal, yaitu modal ekonomi, modal budaya dan modal sosial.<sup>2</sup> Arti modal bukan hanya sekedar materi, namun modal sangat luas maknanya di antaranya memiliki arti hanya berupa simbol. Modal budaya ditafsirkan ke seluruh hal-hal yang bernilai kebiasaan sehari-hari. Modal ekonomi diartikan sebagai modal materi yang menggerakkan kekuasaan. Dan modal sosial dimaknai hubungan yang menyatukan penguasa dengan rakyat demikian sebaliknya.

Bourdieu memusatkan perhatian kepada pentingnya modal pada ranah sosial sebagai sarana pertukaran.<sup>3</sup> Pertukaran dalam bentuk materi atau non-materi memerlukan modal sehingga perlu dicari dalam kehidupan sosial ini.<sup>4</sup> Sehingga fenomena modal diperlukan dalam kehidupan kita, terlebih pada sebuah kompetisi politik untuk meraih simpati masyarakat.

Bourdieu mengartikan modal bersatunya sumber kekuatan dan kekuasaan yang sungguh dapat dimanfaatkan.<sup>5</sup> Modal bermanfaat jika ada kekuatan. Namun tanpa kekuasaan maka kekuatan modal tidak

---

<sup>2</sup> Stella Maria Ignasia Pantouw, *Modalitas dalam Kontestasi Politik (studi tentang modalitas dalam kemenangan pasangan Hanny Sondakh dan Maximilian Lomban pada Pemilu di Kota Bitung Sulawesi Utara tahun 2010)*, 2012, hal.13 dan Isfcogito.org dan Kuasa Simbolik Pendidikan” diakses 9 Juli 2020.

Bourdieu, *Arena Produksi Kultural (Sebuah Kajian Sosiologi Budaya)*,

Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2016, hal. 9.

14.

Yudha Karnanta, *Paradigma Teori Arena Produksi Kultural Sastra: Kajian Pemikiran Pierre Bourdieu*, Jurnal Poetika Vol.1 No.1, Juli 2013, Hal. 11



berarti sama sekali. Kekuasaan dan kekuatan menjadikan modal sebagai amunisi untuk menggerakkan kehendak.

Selain Bourdieu, Johnson menambahkan golongan-golongan modal yang telah disebutkan di atas, yaitu prestise.<sup>6</sup> Prestise dimaknai sebagai kekuasaan simbolik yang ada pada penguasa. Simbol prestise menjadikan otoritas penguasa berlaku dan memiliki wewenang untuk diakui sebagai pemimpin.

Modal ekonomi dapat dipahami secara sederhana adalah hal bernilai seperti uang. Dalam pilkada, modal ini sangat dibutuhkan untuk mendanai segala aktifitas politik calon. Calon yang memiliki dukungan modal ekonomi tinggi tentu akan merasa unggul dari calon lain yang memiliki modal ekonomi yang rendah.

Modal ekonomi juga dapat dipahami sebagai modal finansial. Modal finansial ini dapat membeli segala alat produksi yang merupakan sumber investasi untuk memutar dana.<sup>7</sup> Sehingga modal finansial dapat dilihat secara langsung.

Selanjutnya modal sosial kontestan politik. Menurut Bourdieu, modal sosial itu sumber daya yang faktual yang dapat dipercaya dan diakui karena berasal dari jaringan sosial yang terlembaga.<sup>8</sup> Pendapat ini



---

11  
arto Edi, *Modal Sosial dan Kebijakan Sosial*, dalam  
DAL\_SOSIAL\_DAN\_KEBIJAKAN\_SOSIAL.pdf diakses tanggal 16 Januari  
aria Ignasia Pantouw, 2012, hal. 22-23

juga mengarah kepada keuntungan dan kesempatan di masyarakat untuk menjadi keterwakilan kelompoknya seperti ormas, paguyuban dan perkumpulan lainnya.

Berbeda dengan Bourdieu, Francis Fukuyama memaknai modal sosial sebagai nilai-nilai yang tidak resmi yang disuarakan bersama dari sebuah kelompok.<sup>9</sup> Kelompok ini memberi dukungan sosial untuk membangun kerjasama antara pemberi dan penerima kepercayaan. Hasil dari kepercayaan masyarakat dijadikan modal untuk calon agar berhasil menjalankan visi dan misi atau dalam bahasa sederhana yaitu program-program pemerintah.

Selain modal ekonomi dan modal sosial di atas, calon juga mesti memiliki modal budaya. Modal budaya merupakan hal yang berdampak berdasarkan proses pembelajaran dan tidak bisa diberikan kepada orang lain.<sup>10</sup> Modal budaya ini melekat pada diri setiap individu yang menjalani proses kehidupan. Tentu penting modal budaya ini agar calon memiliki kepribadian yang utuh untuk ditiru di masyarakat.

Modal budaya juga dapat diterjemahkan sebagai segala kualifikasi intelektual yang dapat dimiliki melalui proses pendidikan atau warisan keluarga.<sup>11</sup> Kandidat yang memiliki pendidikan tinggi tentu memiliki modal yang tinggi untuk mendapat kepercayaan masyarakat dikarenakan



---

24

Yudha Karnanta, 2013, hal. 11

mad Adib, *Agen dan Struktur dalam Pandangan Pierre Bourdieu*, BioKultur, Vol i-Desember 2012 h.91-110, hal. 107

18

ilmuwan. Begitu pentingnya modal budaya, sehingga perlu memasukkan warisan leluhur dapat dijadikan modal. Warisan leluhur berupa nilai-nilai kebudayaan yang melekat pada diri setiap kandidat.

Terakhir modal simbolik, yaitu segala bentuk status yang terakumulasi sebagai bentuk.<sup>12</sup> Modal ini merupakan kebanggaan setiap kandidat karena belum tentu dimiliki oleh calon lainnya. Prestise menjadi simbol yang tidak nampak, namun selalu melekat erat pada diri seseorang.

Dalam buku Politik Lokal karangan Halim, dikatakan bahwa modal simbolik yaitu modal yang menghasilkan kekuasaan simbolik.<sup>13</sup> Pengakuan secara institusional maupun non-institusional menjadi bentuk modal simbolik. Konstruksi realitas membuat seseorang yakin dengan kandidat yang akan dipilih melalui modal simbolik. Sehingga, jabatan, mobil mewah, status tinggi sangat penting sebagai modal simbolik kandidat.

Ada hirarkitas golongan modal bagi penguasa. Konversi keempat modal yaitu modal ekonomi, modal sosial, modal budaya dan prestise merupakan kekuatan paling di atas (*powerfull*). Jika penguasa hanya memiliki tiga modal atau bahkan hanya dua modal, maka digolongkan penguasa yang menengah. Paling terbawah, jika penguasa hanya



---

mad Adib, 2012, hal. 107

Halim, *Politik Lokal Pola, Aktor dan Alur Dramatikalnya (Perspektif Teori e, Modal dan Panggung)*, Yogyakarta: LP2B, 2014, hal. 110-111.

menguasai satu modal dalam berkuasa. Maka kekuasaannya hanya memiliki kekuatan yang tidak terlalu berefek. Dalam hal pencalonan gubernur, modal ini semua yang akan membuat kandidat yang kuat berhasil memenangkan kontestasi.

Kontestasi bagi Bourdieu memiliki struktur yang objektivisme dan subjektivisme. Ada hubungan antara subjektivitas dan objektivitas melalui realitas sosial.<sup>14</sup> Hubungan struktur ini yang disebut struktur konstruktivisme. Struktur yang saling membangun ini yang disebut konstruk atau dalam istilah Bourdieu disebut strukturalisme genetis.<sup>15</sup> Produk agen (pelaku) dan struktur terbangun dari realitas sosial, budaya, dan sejarah (*history*).

Dalam kontes pemilu, kandidat yang bertarung akan berusaha memenangkan arena kontestasi politiknya. Maka amunisi yang sangat penting dimiliki oleh para calon adalah modal yang cukup. Tidak perlu menguasai semua modal sebagaimana diungkapkan Bourdieu. Namun, modal yang terpenting yang dimiliki adalah modal dukungan yang cukup untuk mengalahkan para pesaingnya. Tentu dengan banyaknya calon, maka dukungan akan terbagi pula. Sehingga dukungan yang cukup untuk memenangkan kontestasi itulah yang perlu dimiliki.

Dalam penelitian ini akan melihat bagaimana kekuatan modal ekonomi, budaya dan simbolik pasangan calon gubernur di



---

mad Adib, 2012, hal. 96  
. 96

Sulawesi Selatan khususnya pasangan Agus Arifin Nu'mang dan Tanribali Lamo. Keikutsertaannya dalam kontestasi bukan hitungan hanya satu kali, melainkan sudah dipikirkan secara mendalam. Kekuatan modal tentu sudah dikalkulasi untuk meraih dukungan sehingga berhasil memenangi pilkada.

## 2.2. Konsep Aktor

Konsep aktor menurut Monroe, yaitu konsep yang menitikberatkan pada individu yang berusaha meraih tujuan dan mampu memberi keputusan dari banyaknya alternatif. Konsep aktor juga meliputi pengetahuan yang luas sambil berkompetisi, memiliki komitmen pada kepentingan individual serta memaksimalkan utilitas.<sup>16</sup>

Aktor merupakan sesuatu yang menunjukkan pada pelakunya. Aktor juga bagian dari konstruksi sosial. Dalam Modul Sosiologi Universitas Terbuka, dikatakan bahwa aktor dapat dilihat dalam dua bentuk yaitu aktor dalam bentuk suatu interaksi dan aktor dalam masyarakat.<sup>17</sup> Aktor dalam bentuk suatu interaksi yaitu individu yang berinteraksi dengan satu individu atau dengan beberapa individu. Sedangkan aktor dalam masyarakat dimaknai sebagai individu yang profil



---

1 A. Wandling, *Rasionalitas dan Pilihan Rasional*, dalam Ilmu Politik, John T. Jan Marijke Breuning (eds), Jakarta: Kencana, 2013, hal. 62

r, *Sosiologi Konsumsi* Modul 1-9 Sosiologi, Tangerang Selatan: Universitas 2014, h. 1.26-1.27

disembunyikan dalam suatu masyarakat. Jika individu telah bergabung dalam masyarakat, maka segala identitasnya sudah tidak dihitung walau tetap melekat pada diri individu tersebut.

Berbeda dengan pendapat Damsar di atas, Muhlis memaknai aktor sebagai posisi yang sangat strategis dalam institusi.<sup>18</sup> Dalam sebuah institusi aktor menjadi elemen penting dalam pembuatan segala kebijakan. Tentu aktor yang paling tinggi akan memiliki kekuasaan yang tinggi juga dalam pembuatan kebijakan.

Selain itu, aktor dalam menempati posisinya memiliki dua tempat.<sup>19</sup> Tempat yang pertama yaitu kelompok dalam organisasi birokrasi (*the official office makers*) dan kelompok yang berada di luar organisasi birokrasi (*un-official office makers*). Aktor akan menempatkan posisi kekuatannya sesuai dengan tingkatan kekuasaannya. Kekuasaan aktor akan memengaruhi dan memberi dampak kepada seluruh elemen masyarakat. Ini yang menjadi penting untuk peran aktor politik dalam mengatur masyarakat.

Aktor politik juga memiliki model interaksi yang secara umum digambarkan sebagai berikut: interaksi asosiasi dan interaksi disosiasi.<sup>20</sup> Interaksi asosiasi terdiri dari kerjasama, akomodasi dan asimilasi.



---

<sup>18</sup> Madani, *Dimensi Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik*, Graha Ilmu, 2011, hal. 36-37.

. 41-42.

. 50

Sedangkan interaksi disosiasi terdiri dari persaingan, kontroversi dan pertentangan.

Dalam penelitian ini, akan difokuskan pada model interaksi asosiasi. Bagaimana Agus selama pencarian calon pasangannya memberi kesempatan bagi siapa saja. Bahkan membuat publik takjub, dikarenakan Agus akan maju melalui jalur independen atau perseorangan.

Sedangkan interaksi diasosiasi, akan melihat bagaimana persaingan aktor dalam menggapai tujuan politik memenangi kontestasi kepala daerah di Sulawesi Selatan. Agus dan kandidat aktor lainnya menyusun strategi agar mampu bersaing secara positif untuk meraih kursi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018.

Selanjutnya, ada empat tipologi interaksi aktor dalam penggunaan kekuasaannya:<sup>21</sup>

1. *Decisional*, yaitu interaksi seluruh aktor politik yang terlibat dalam menetapkan sebuah kebijakan bersama.
2. *Anticipated reaction*, yaitu interaksi langsung di waktu-waktu tertentu.
3. *Nondecision making*, yaitu adanya interaksi kelompok yang kuat dalam memengaruhi kebijakan. Pendukung para aktor akan



---

. 55—56

melakukan hubungan secara eksternal untuk memajukan atau menyertai kepada aktor yang disokongnya.

4. *Systemic*, yaitu sama seperti sistem politik. Segala kebijakan memiliki proses untuk terbentuk jadi bagian dari sistem politik.

Dari empat tipologi interaksi di atas, yaitu interaksi aktor, interaksi langsung, interaksi kelompok kuat dan menjadi bagian dari sistem politik serta uraian penting dalam hasil penelitian. Semua jenis tipologi interaksi ini akan melihat bagaimana aktor-aktor yang memainkan perannya sehingga untuh menjadi pasangan calon gubernur bersama Agus Arifin Nu'mang.

### 2.3. Macam-Macam Kekuatan Politik

Dalam menganalisa kekuatan politik, tentu harus diketahui dari mana kekuatan pemain itu dimiliki. Menurut Almond, ada bentuk atau macam-macam kekuatan yang digunakan untuk meraih kepentingan dalam meraih tempat dalam lingkungan politik.<sup>22</sup> Yaitu kelompok kepentingan dan partai politik. Menurut Almond, setiap kelompok akan mengartikulasikan kepentingan sesuai yang hendak dicapai. Kepentingan Agus dalam pencalonan memiliki kekuatan di antaranya dari kelompok gan dan partai politik. Kekuatan inilah yang digunakan untuk



---

A. Almond, *Kelompok Kepentingan dan Partai Politik*, dalam *Perbandingan Politik*, Mochtar Mas'oeed dan Colin MacAndrews (eds), 2013, h. 64

menjadi penggerak dalam mencalonkan dalam pemilihan gubernur di Sulawesi Selatan.

Kelompok kepentingan berbeda dengan partai politik. Kelompok kepentingan menurut Almond, merupakan segala kegiatan yang terorganisir untuk memengaruhi pemerintah dan mau memiliki kedudukan yang strategis.<sup>23</sup> Dalam melihat kelompok kepentingan bagi setiap calon kepala daerah seperti gubernur, kelompoknya akan berusaha mendukung calonnya. Di Sulawesi Selatan calon kepala daerah akan mendapat sokongan suara dari para kelompok yang akan menaruh kepentingannya kepada calon yang potensial. Agus memiliki kekuatan untuk pencalonannya di antaranya dari kelompok kepentingan seperti kelompok agama Nahdatul Ulama (NU).

Kelompok kepentingan memiliki banyak bentuk makna. Budiardjo mengartikan bahwa partai politik berbeda dengan kelompok penekan (*pressure group*) dalam istilah kontemporer kelompok kepentingan (*interest group*).<sup>24</sup>

Berbeda dengan Miriam, Surbakti memaparkan makna kelompok kepentingan sebagai berbagai aktifitas manusia yang memiliki kemiripan berdasarkan sifat, sikap, keyakinan dan tujuan yang bermufakat saling mengatur diri untuk menjaga demi menggapai tujuannya.<sup>25</sup>



---

A. Almond, hal. 65

3udiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2008, hal. 162

Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, hal. 140

Senada dengan Surbakti, Derbyshire menjelaskan bahwa kelompok kepentingan itu organisasi yang bertujuan untuk merepresentasikan, memasarkan dan merebut kepentingan tertentu.<sup>26</sup>

Dari beberapa makna kelompok kepentingan di atas berdasarkan para pakar ilmu politik. Maka dapat disimpulkan secara sederhana tentang kelompok kepentingan. Pertama, orang-orang yang terorganisir dan punya cita-cita serta berusaha menggapainya. Kedua, sama tujuan yang hendak dicapai dan membuat ciri khas sendiri dari kelompoknya agar berbeda dengan yang lain. Ketiga, seluruh aktifitasnya berkaitan dengan isu-isu politik yang mengarah agar mewarnai kebijakan-kebijakan pemerintah. Keempat, seluruh perilakunya berdasarkan pergerakan rakyat sebagai bentuk tuntutan agar pemerintah mampu memenuhinya. Kelima, seluruh tingkah kelompok kepentingan tidak hanya untuk mendapatkan posisi strategis, namun untuk menggiring pendapatnya agar dimasukkan dalam kebijakan pemerintah. Keenam, banyaknya bentuk wujud dari kelompok kepentingan sesuai dengan tujuan kepentingannya. Ketujuh, kelompok kepentingan itu sebagai wakil rakyat yang banyak untuk menyuarakan suara-suara rakyat.

Dari kelompok kepentingan ternyata ada beberapa tipe yang berbeda tujuan. Masing-masing dari kelompok kepentingan itu teratur dan



---

iryadi, *Kerangka Analisis Sistem Politik Indonesia*, Yogyakarta: IRCISoD, 2006,

terstruktur untuk mencapai kepentingannya. Berikut jenis-jenis kelompok kepentingan menurut Almond<sup>27</sup>:

a. Kelompok Anomik

Menurut Almond, kelompok ini berasal dari unsur akar rumput yang tiba-tiba dan umurnya tidak memakan waktu yang lama. Menurutnya, kelompok ini tidak memiliki nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam institusinya. Misalnya, aksi demonstrasi, peperangan dan kekerasan politik. Sehingga secara sederhana kita dapat memahami kelompok anomik sebagai kelompok yang semu.

b. Kelompok Non-Assosiasional

Kelompok ini hampir sama dengan kelompok anomik namun bedanya ditujuannya yang terorganisasi secara rapih dan teratur. Kelompok ini umumnya berbentuk dari lingkungan keluarga, pemimpin dan lain sebagainya. Kelompok non-asosiasional ini menurut Almond sebagai *village group* (grup yang kampung) karena hanya mengikuti pilihan berdasarkan arahan penguasa.

c. Kelompok Institusional

Kelompok ini terbangun karena kesamaan kepentingan. Misalnya partai politik, militer dan banyak lagi. Secara teknis kelompok inilah yang

bertugas sebagai lobi kepada pemerintah.

---

A. Almond, hal. 66-69



#### d. Kelompok Assosiasional

Berkumpulnya orang-orang untuk belajar agama merupakan bagian dari ikatan assosiasional. Itulah mengapa kelompok belajar ini sangat kuat solidaritasnya disebabkan ada kesamaan kepentingan yang menjadi pedomannya. Ini merupakan asas untuk menjaga kelompoknya agar tidak direkrut oleh kelompok lain yang berbeda visi. Menurut Almond, jika kelompok ini dibiarkan maka otomatis akan meregulasi segala kepentingan kelompok lain. Kelompoknya merupakan bagian dari strategi karena sering tampil dan mendapat pengakuan dari masyarakat. Kelompok ini mampu memberi hambatan untuk berkembang kelompok-kelompok anomik, non-assosiasional dan institusional.

Selain dari kelompok kepentingan di atas, ada satu lagi kekuatan yang dilakukan oleh para ilmuwan politik yaitu partai politik. Dalam sejarahnya, parpol mulai tertata pada akhir abad ke-18 dan ke-19 di Eropa Barat<sup>28</sup>. Parpol muncul disebabkan kelompok-kelompok yang berada di luar kekuasaan untuk berkompetesi dalam jabatan dan pengaruh.

Dalam buku Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia<sup>29</sup>, Budiardjo menyebut fungsi partai politik sebagai berikut: sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, rekrutmen politik dan



---

A. Almond, hal. 75  
am Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di*  
, Jakarta: Rajawali Press, 2015, hal. 16

pengatur konflik. Berikut penulis akan menguraikan satu persatu disertai contoh.

Parpol sebagai sarana komunikasi politik adalah proses penyampaian pesan. Pesan dari rakyat disampaikan melalui parpol dan parpol kepada pemerintah begitu sebaliknya. Parpol juga menjadi ujung tombak komunikasi pemerintah dalam hal penyampaian program-program kepada rakyat. Dalam hal ini, parpol menjadi hubungan masyarakat (humas) bagi pemerintah dan rakyat. Contoh, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang selalu menjadi oposisi bagi pemerintahan Presiden yang berkuasa saat ini. Semua anggota Gerindra dari Ketua Umum sampai Legislatifnya selalu menjadi pionir untuk menyampaikan serangan sebagai pembelaan rakyat.

Kedua, parpol sebagai sarana sosialisasi politik. Fungsi ini merupakan usaha parpol untuk menyampaikan nilai-nilai parpol. Caranya melalui pendidikan dan indoktrinasi.<sup>30</sup> Partai Gerindra misalnya, partai ini membangun Balai Pendidikan Partai Gerindra di Hambalang, Bogor. Melalui lembaga ini, Gerindra melakukan pendidikan dan memasukkan nilai-nilai dasarnya kepada setiap peserta pendidikan itu. Belum lagi melalui televisi yang dimiliki, Gerindra dengan gencar menanamkan benih-benih partai kepada masyarakat tanpa ada batasan waktu dan ruang.



---

im Labolo dan Teguh Ilham, hal. 20-22

Ketiga, parpol berfungsi sebagai rekrut anggota partai. Tugas ini berat bagi partai karena harus memilih calon-calon anggota yang loyal. Para kader nantinya menjadi penguasa dan diharapkan mampu memberi balasan yang lebih kepada partainya. Proses rekrut memerlukan kerja keras partai. Menurut Bailusy<sup>31</sup>, dalam proses rekrut paling ideal buat partai menggunakan sistem merit yang berorientasi pada kompetensi anggota. Jika tidak, ini yang dikatakan rekrut TOMANURUNG meminjam istilah Kausar bagi parpol. Misalnya, ketua Gerindra Sulawesi Selatan saat ini Idris Manggabarani. Idris dalam pandangan penulis bukan kader militan dalam partai ini. Namun, Idris memiliki finansial sehingga diperlukan partai dan dijadikan sebagai ketua.

Terakhir, parpol berfungsi sebagai pengatur konflik. Artinya parpol dijadikan sebagai selalu pemecah kebuntuan. Parpol melalui kerja para anggota dewan memperjuangkan apa yang dituntut. Semuanya dilakukan atas nama rakyat. Terpenting, semua keputusan parpol tidak selalu memberi kenyamanan bagi para pendukungnya. Misalnya, isu sara dalam pemilihan gubernur di Jakarta. Gerindra hadir sebagai pencipta konflik untuk mendapat pendukung salah satu pasangan calon. Terlepas dari dukungan itu, Gerindra selalu menjadi pembela pemersatu melalui Pancasila. Seperti ini yang sebenarnya yang mesti selalu dilakukan parpol demi terpeliharanya persatuan bangsa.



---

sar Bailusy, *Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Politik*, UNHAS: Makassar, 26

## 2.4. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Pertimbangan mendasar dalam sebuah penelitian dalam meninjau kembali penelitian sebelumnya merupakan susunan yang berantai sehingga fenomena sosial dapat dilihat lebih dari sudut pandang dengan pendekatan yang berbeda-beda. Kajian-kajian terdahulu mutlak disajikan, karena perlu diingat manfaat akademik dari penelitian merupakan donasi pengetahuan pada kekhususan ilmu politik dan kemajuannya, serta kajian ilmu politik dalam hal mengukur kekuatan politik calon kepala daerah yang akan bertarung dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada).

Berdasarkan hasil pengamatan dan kepustakaan, terdapat beberapa penelitian yang mengangkat topik relevan tentang kekuatan politik, baik penelitian yang sifatnya dilakukan oleh akademisi maupun di level kelembagaan. Berikut ini uraian orientasi penelitian terdahulu yang dianggap relevan dibandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan.

1. Pratiwi Fajriyah dalam Jurnal Politik Muda Vol. 6 N0. 3, Agustus – Desember 2007 186-193 “*Pecah Kongsi Petahana Dalam Pencalonan Kepala Daerah Di Pilkada Kabupaten Mojokerto 2015*”.

Penelitian ini berhasil mengungkap bagaimana uang, konsolidasi dan  
vei menentukan arah koalisi calon kepala daerah untuk bersaing  
pemilukada. Penelitian di Mojokerto ini mengkaji mengapa



petahana tidak bersama kembali dalam pencalonan kepala daerah. Setidaknya ada enam yang menyebabkan pecah kongsi petahana di Mojokerto. Pertama, karena perbedaan pandangan dalam sebuah program saat masih menjabat. Kedua, karena tidak ada pembagian tugas yang jelas bagi pasangan ini saat masih berkuasa di Mojokerto.

Selanjutnya sebab ketiga pecah kongsi dikarenakan sama-sama memiliki modal finansial yang kuat. Keempat, sama-sama berambisi menjadi orang nomor satu di Mojokerto. Kelima, melemahnya dukungan dari NU. Dan terakhir, melemahnya dukungan partai pendukung saat masih menjabat.

Penelitian ini menggunakan teori kelembagaan baru. Yaitu melihat aktor dari lembaga formal bermain kepentingan dengan lembaga eksternalnya. Ada aktor-aktor luar yang berusaha memengaruhi segala keputusan internal. Penelitian ini tentunya didasari melalui penelitian lapangan dengan wawancara dengan sampel yang telah ditentukan.

2. Pratikno dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 10 No. 3, Maret 2007 "*Calon Independen, Kualitas Pilkada dan Pelembagaan Parpol*".

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk menkritik fenomena-fenomena yang terjadi pada pemilu 2005-2006. Bahwa adanya konstitusi saat pilkada itu berlangsung. Pertama, adanya konflik internal sebagai lembaga yang ikut serta dalam pilkada. Konflik elit dan



kader parpol baik di tingkat pusat sampai ke daerah tidak bisa dibendung. Semuanya memiliki kepentingan dengan membawa kepentingan partai.

Kedua, proses pencalonan yang mengharuskan calon kepala daerah mendapat dukungan minimal 15% suara bagi parpol yang mengajukan calon kepala daerah. Penelitian ini menunjukkan bahwa koalisi parpol untuk mendukung kepala daerah didasari pragmatisme semata. Aliran ideologi partai tidak lagi relevan untuk mencalonkan calon kepala daerah.

Penelitian ini bermaksud untuk menciptakan saingan baru bagi parpol dalam pilkada. Calon independen diberikan kewenangan untuk ikut serta dalam pemilukada sesuai dengan aturan yang berlaku. Kehadiran calon independen juga dapat berakibat positif untuk konsolidasi internal dan koalisinya agar memenangi pilkada.

3. Galih Satria Utomo dalam Jurnal Politik Muda Vol.1/No.1 (2012) “Relasi Kekuatan-Kekuatan Politik Lokal Dalam Pemenangan Pilkada di Mojokerto”.

Penelitian ini mengkaji fokus masalah terhadap apa yang menjadi hubungan untuk memenangi Pilkada di Mojokerto. Hasil kajian Utomo menyimpulkan bahwa ada hubungan yang erat di tingkat kekuasaan politik di Mojokerto. Politik lokal sangat berperan di Mojokerto. Hubungan antar partai politik menjadi pengikat kekuatan di ranah kehidupan



Penelitian ini menggunakan teori relasi kekuasaan. Dalam penelitiannya, desentralisasi memberi ruang ke banyak aktor politik untuk saling berhubungan. Dan itu memberi corak sendiri dalam melihat berbagai macam tindakan aktor politik yang satu dan lainnya. Di Kabupaten Mojokerto ada tiga pasangan calon yang memiliki relasi kuat di antara kontestan ini.

4. Rosa Arista Narendra dalam Jurnal Ilmu Politik POLITIKA (2013) [ejournal.undip.ac.id](http://ejournal.undip.ac.id) "*Strategi Komunikasi Politik Pasangan Bambang-Icek Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011*".

Dalam Penelitian ini membahas bagaimana kekuatan petahana untuk mempertahankan kekuasaannya. Visi-misi yang kuat dan komunikasi ke masyarakat menjadi senjata untuk meraih dukungan rakyat kembali kepadanya. Dukungan dari partai politik juga menjadi alat utama untuk meraih simpati rakyat.

Penelitian menghasilkan delapan kesimpulan dari keberhasilannya pasangan incumbent ini meraih dukungan rakyat. Merawat ketokohan, pemantapan kelembagaan, memahami khalayak, pesan persuasif, metode penyampaian, memilih media, seni kompromi, dan membuka diri.



5. Stella Maria Ignasia Pantouw (2012) *Modalitas dalam Kontestasi Politik (Studi tentang Modalitas dalam Kemenangan Pasangan Hanny*

*Sondakh dan Maximiliaan Lomban dalam Pemilukada di Kota Bitung Sulawesi Utara Tahun 2010*”.

Tesis ini hendak melihat dukungan politik dan ekonomi dari masyarakat. Selain modal figur, dana menjadi persaingan yang menentukan pantasnya seorang kandidat bersaing. Sehingga penelitian ini berhasil menggambarkan persaingan politik dan dana politik dari kemenangan calon Walikota Bitung.

Penelitian ini menyimpulkan tiga modal untuk kemenangan kontestasi. Modal politik dalam hal ini jabatan dan dukungan serta solidnya dukungan. modal sosial itu interaksi, jaringan dan kepercayaan masyarakat. Terakhir, modal ekonomi menyangkut dana dan perusahaan pendukung. Ketiga ini menjadi modal utama untuk meraih kemenangan dalam pemilukada di Kota Bitung.

Dari kelima penelitian di atas menunjukkan fokus penelitian tentang Dinamika Politik Agus Arifin Nu'mang dalam Menentukan pasangan pada pilkada Sulawesi Selatan Tahun 2018 belum pernah diteliti. Namun demikian, terdapat aspek persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Berikut uraian aspek persamaan penelitian tersebut:



- Topik penelitian yang sama seputar dinamika kekuatan politik dalam Pilkada.

- b. Penelitian pertama melakukan studi kasus pecah kongsi petahana dalam Pilkada Tahun 2015 khususnya daerah Mojokerto.
- c. Penelitian kedua menganalisa aspek kekuatan calon independen dan calon dukungan parpol.
- d. Penelitian ketiga dengan studi kasus relasi kekuatan politik di Mojokerto yang menganalisa hubungan aktor-aktor pada Pilkada di Kabupaten Mojokerto ini.
- e. Penelitian keempat menganalisa strategi komunikasi calon sehingga mendapat dukungan dalam Pilkada di Kabupaten Grobogan.
- f. Penelitian kelima menganalisa aspek modal politik dan dana untuk memuluskan dukungan di pilkada Kota Bitung.

Sedangkan letak perbedaannya yaitu:

- a. Penelitian pertama dilakukan secara khusus yang lokasi penelitiannya terpusat di Kabupaten Mojokerto.
- b. Penelitian kedua cenderung melihat kekuatan calon independen dan calon dukungan parpol.
- c. Penelitian ketiga juga hanya menganalisa kekuatan aktor politik setelah Pilkada selesai.



- d. Penelitian keempat berfokus dalam strategi komunikasi pasangan petahana sehingga berhasil memenangi pilkada.
- e. Penelitian kelima cenderung membahas modal politik dan modal dana dalam pemenangan pasangan calon walikota.
- f. Penelitian ini bersifat *Field Research* dengan mengfokuskan analisis pada dinamika politik Agus Arifin Nu'mang – Aliyah Mustika, Agus AN – Andi Nurpati dan Agus AN – Tanribali dalam pilkada Sulawesi Selatan serta menganalisa modal dan hambatan-hambatan yang ditemui dalam proses menentukan calon pasangan gubernur dan wakil gubernur.

## 2.5. Kerangka Pikir

Kekuatan politik selalu ada dinamika naik dan turun. Saat naik, maka kekuatan itu akan menjadi pendorong untuk memenangkan segala pertarungan. Jika turun, maka kekuatan akan menjadi lemah dalam pertarungan politik. Setiap individu akan memainkan perannya agar dapat tampil di panggung masyarakat sehingga dapat dukungan menjadi kekuatan.

Kekuatan politik memberi setiap petarung politik upaya untuk ketesi. Bukan hanya itu, bagaimana pertarungan politik mendapat yang banyak sehingga mampu di awalnya yaitu mencalonkan diri.



Pencalonan ini akan mengukur basis kekuatan calon sehingga dikatakan mampu untuk berjuang ke jenjang selanjutnya dalam tahapan pemilihan.

Berdasarkan paparan kerangka berpikir di atas, maka perlu dilakukan penelitian yang menganalisis dinamika politik Pencalonan Agus Arifin Nu'mang – Tanribali Lamo dalam pilkada tahun 2018 di Sulawesi Selatan.



**Gambar 2.1 Kerangka Penelitian**

